

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Dharmasaputra, M. (2013). *Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group*. Jakarta: Tempo.
- Hadjar, A. F., Adnan Pasliadja, Eva Achjani Zulfa, Yunus Hussein, dan Yustinus Pastowo. (2014). *Menghukum Pengemplang Pajak: Hasil Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) & Indonesian Corruption Watch (ICW).
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah F. (2013) Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, PT Kencana, Jakarta.
- Khalimi, dan Moch. Iqbal. (2020). *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Krimiyarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahrus Ali, (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Dwidja Prityanto. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayidah, N., Aminullah Assagaf, Sulis Janu Hartati, dan Muhajir. (2019). *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Remy, Shajdeini, Sutan (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, J. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto. (2018). *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Remy Sjahdeini Sutan, (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Swajie, H.F, 2013, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) & Indonesian Corruption Watch (ICW). (2014). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara*

Nomor: 2239 K/Pid.Sus/2012, dengan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group). Jakarta.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Yurizal. (2017). *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Skripsi, Thesis, Jurnal, dan Artikel Ilmiah Lainnya

Alkostar, A, 2016, kedudukan dan tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, makalah dalam seminar “ Kedudukan dan tanggungjawab korporasi dalam tindak pidana korupsi” Diklat Mahkamah agung.

Akrial, Z., dan Heni Susanti. (2017). Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

- Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *UIR Law Review*. 01, (02). 137-149. Diakses dari file:///C:/Users/HP/Downloads/editoriallawreview,+Production+editor,+3+Zul+Akrial+dan+Hen+Susanti.pdf
- Arsil, 2015, *Dapat Tidaknya Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Pasal Yang Tidak Didakwa*, Jurnal Dictum, Nomor 10.
- Faradila, F., dan Nur Kholim. (2024). Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia. *Action Research Literate*. 8, (11). 3174-3184. Diakses dari <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>
- Hadziq, S., dan Gatot Sugiharto. (2024). Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta. *Lex Renaissance*. 9, (1). 134-156. Diakses dari <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7>
- Hawasara, W., Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. 08, (01). 587-594. Diakses dari <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>
- Hidayat, S. (2019). Pemidanaan Terhadap Korporasi Atas Transfer Pricing Di Bidang Perpajakan. *Thesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Husni. (2015). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. *Jurnal Reusam*. IV, (1). 75-88. Diakses dari file:///C:/Users/HP/Downloads/1957-4635-1-SM-1.pdf
- Iskandar, M. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas
- Ismail. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. 18, (2). 41-56. Diakses dari https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920/1550?_cf_chl_tk=CbDF512o8gM_5pF1_cuo4jwOgH04Q6vYcDcMA.Kcmgg-1745765471-1.0.1.1-k7d0U7YsMwsNJPIL.oFRm8BK5sCCPb994IxoHWSEU8E
- Johari. (2020). Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. VIII, (2). 118-126. Diakses dari file:///C:/Users/HP/Downloads/3811-9645-1-SM.pdf

- Kusumo, B. A. (2008). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Wacana Hukum*. VII, (2). 52-65. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23549-ID-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>
- (2009). Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan. *Wacana Hukum*. VIII, (2). 93-106. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23535-ID-sanksi-hukum-di-bidang-perpajakan.pdf>
- Mahmud, M. I. (2020). Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik). *Lex Renaissance*. 5, (4). 767-779. Diakses dari <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1>
- Makalew, J. M., Revy Korah, dan Carlo A. (2023). Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata. *Lex Administratum*. 11, (2). Diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/Jurnal+JORDAN+MARCIANO+MAKALEW.pdf>
- Marbun, R., dan Maisha Ariani. (2022). Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*. 03, (02). 72-85. Diakses dari DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.85
- Margareta, S., dan Tanudjaja. (2024). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*. 3, (3). 107-113. Diakses dari <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.1004>
- Mihardja, A., Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony. (2020). Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 8, (1). 73-81. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/561570-vicarious-liability-perspektif-masa-kini2caa9129.pdf&ved=2ahUKEwiw3eOOz_uMMaxM4zgGHcZbPak4FBAWegQIFRAB&usg=AOvVaw3W9IfJK_8zXeYtc6_gdUAz
- Muladi dan Priyatna, D, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jawa Barat.
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia Sebagai Subyek Hukum. *‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. 6, (1). 27-34. Diakses dari <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>

- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 5 (1). 192-206. Diakses dari <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Roem, A. M. (2025). Unsur Corpus Dan Animus Dalam Pemahaman Bezit Di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, (1). 3422-3435. Diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Rohi, G. M. E., I Nyoman Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*. 4, (3). 226–231. Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Suhariyanto, B, 2015, *Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum*, Jurnal Yudisial, Nomor 8
- Saputra, B. B., Fien Mangiri, Roberto Rossi, dan Puguh Prastyawan. (2022). Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/Pid.Sus/2019). *Jurnal Ikamakum*. 1, (2). 726-749. Diakses dari <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15521>
- Saputra, F., Yusrizal, dan Budi Bahreisy. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*. 2, (9). 733-741. Diakses dari <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.224>
- Suhariyanto, B. (2017). Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability (Kajian Putusan Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012). *Jurnal Yudisial*. 10, (1). 17-38. Diakses dari <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>
- Sembiring, D. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Oleh Direktorat Jendral Pajak. *UNES Law Review*. 6, (3). 9390-9420. Diakses dari <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. 111-128. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/240087/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang>

- Tarigan, A. L. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan Di Indonesia. *Thesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ulfadani, E., dan Dahlan Ali. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh). *JIM bidang Hukum Pidana*. 3, (2). 310-319. Diakses dari <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16073/0>
- Utama, M. S., Amir Junaidi, dan Ismiyanto. (2024). Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak Secara Online. *Ranah Research: Journal of Multidiciplinary Research and Development*. 7, (1). 279-286. Diakses dari DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
- Wahyudi, R., Jamaluddin, dan Yusrizal. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Penyalahgunaan Faktur Pajak (Studi Putusan No. 35/ Pid.Sus/2022/Pn.Lsm). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 12, (1). 177-201. Diakses dari <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15223>
- Widianto, D. A., dan Helmi. (2024). Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 3, (2). 14-34. Diakses dari <http://jurnal.anfa.co.id>

D. Sumber Lainnya

- Asep Nursobah, *Vicarious Liability*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>. Akses tanggal 29 April 2025.
- Citasco, *Usut Tuntas Mega Skandal Pajak Asian Agri*, <https://www.citasco.com/news/usut-tuntas-mega-skandal-pajak-asian-agri/>. Akses tanggal 22 Oktober 2024.
- Surya Wulan Dani, *Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, <https://www.pajak.go.id/id/mengenal-unsur-unsur-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>. Akses tanggal 13 April 2025.